

Community Participation in Infrastructure Maintenance in North Aceh Regency

Randa Syahputra¹⁾, Dahlan A. Rahman²⁾, Muhammad Fazil³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

*Corresponding Author: muhammadfazil@unimal.ac.id

Abstract

Community participation is the most important thing in infrastructure maintenance. Without community participation, the development built by the government will not last long if it is not properly cared for by the community. Community participation in infrastructure maintenance in Aceh Utara using the theory according to Cohen and Uphoff cited by Joyce and Joorie (2021) namely Participation in Decision Making, Participation in Implementation, Participation in Utilization, and Participation in Evaluation. The type of research used is qualitative descriptive with data collection techniques in the form of interviews, documentation and observations. The sampling technique was carried out by purposive sampling. The data source uses primary data, secondary data. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that community participation in infrastructure maintenance in Aceh Utara is still not optimal, which can be seen from Participation in Decision Making is still relatively low. Participation in Implementation There is still a low level of awareness and community involvement. Participation in Utilization There is still a low awareness in maintaining, caring for and maintaining every development result made by the government and Participation in Evaluation often criticizes the government, but the government does not respond to criticism from the community. The factors that cause the lack of community participation in infrastructure maintenance in Aceh Utara are economic factors that make people reluctant to participate and from environmental factors that lack a sense of concern in infrastructure maintenance. It is recommended to the Public Works and Spatial Determination Office of North Aceh Regency to further increase public awareness and concern in carrying out infrastructure maintenance, such as providing socialization and guidance for the gampong community regarding the importance of infrastructure maintenance.

Kata kunci: Participation, Community, Development, Maintenance, Infrastructure

Pendahuluan

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki tugas untuk pembangunan terhadap sarana dan prasarana untuk masyarakat yang selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pembangunan Negara (Zuhro, 2018). Pembangunan merupakan tolak ukur perkembangan suatu daerah. Otonomi daerah yang digencarkan pemerintah telah membuat sebagian besar daerah-daerah seluruh Indonesia telah melakukan pembangunan disegala sektor baik informal maupun formal (M, 2013; Nizar & Alqarni, 2021).

Pembangunan bertujuan dalam mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat dan juga dapat menaikkan taraf hidup dengan cara dalam menyediakan sarana dan prasarana yang berkondisi optimal dengan baik, akan tetapi hal tersebut telah dilakukan dengan proses perencanaan untuk membangun infrastruktur yang berkualitas. Infrastruktur juga dapat disampaikan sebagai fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang dibangun pemerintah atau pun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat dalam ruang lingkup sektor ataupun aspek sosial-ekonomi (Sambodo et al., 2020).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan kegiatan sosial. Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Kegiatan penduduk dapat ditampung dalam ruang-ruang sarana sosial dan ekonomi, tetapi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh pelayanan infrastruktur yang memadai (Hartati, 2020; Marlon Sihombing, 2007).

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari perencanaan. Menurut Catanesey, dan Snyder dalam (Wu, 2021) dalam bukunya Perencanaan Kota, bahwa keberadaan infrastruktur ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan dan prospek perkembangan ekonominya. Namun sejauh ini tidak disadari oleh masyarakat. Terlihat banyak infrastruktur dan sarana lingkungannya yang dibangun oleh pemerintah kurang mendapat perhatian dari masyarakat dalam hal pemeliharannya.

Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah kota maupun pedesaan, karena dapat kita lihat begitu besar pengaruh dari dorongan tersebut, dorongan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya dorongan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikut sertaaan masyarakat akan sangat dibutuhkan

dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan Pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam Pembangunan tersebut.

Pada tahun 2020 Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir. Kerusakan Infrastruktur tersebut terdiri dari rumah, jembatan, jalan, tebing, dan tanggul. Namun yang menjadi perhatian yaitu banyaknya kerusakan atau jebolnya irigasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Jebolnya irigasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terjadi di Gampong Mancang, Menasah Jok, Menasah Kumbang, Meunasah Geumata, dan beberapa wilayah lainnya yang ada di Kecamatan Lhoksukon. Akibat dari jebolnya irigasi tersebut, sebanyak 230 hektar lahan persawahan yang ada di Kecamatan Lhoksukon mengalami gagal panen dan sebanyak 5.136 jiwa masyarakat mengalami kerugian akibat dampak dari kerusakan infrastruktur tersebut (Furna, 2022).

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti di Dinas PUPR Aceh Utara, tercatat ±10 unit tanggul yang rusak di Kecamatan Lhoksukon. Jumlah tersebut tergolong tinggi dan sangat meresahkan masyarakat di wilayah Kecamatan Lhoksukon, karena apabila pemerintah tidak dengan segera melakukan pemeliharaan infrastruktur pada bagian irigasi, kemungkinan besar yang terjadi masyarakat akan terus mengalami gagal panen. Pemeliharaan infrastruktur irigasi disetiap wilayah perlu dilakukan, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Utara. pemeliharaan infrastruktur tidak hanya kepada pemerintah saja akan tetapi masyarakat di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara juga turut membantu pemerintah dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur irigasi.

Dapat dilihat saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara akan tetapi kebijakan tersebut masih belum optimal. Jika dilihat banjir yang datang pada setiap tahunnya akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur irigasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara masih kurang maka banjir akan selalu melanda Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Hingga tahun 2024 awal Januari Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara masih dilanda banjir. Infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah Aceh Utara semakin tidak terurus oleh masyarakat sekitar. Agar banjir tidak terus melanda di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara perlunya kesadaran masyarakat dalam merawat infrastruktur yang sudah difasilitasi oleh pemerintah Aceh Utara. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan mengakibatkan banjir yang terjadi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara terus melanda.

Metodologi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dinas PUPR Alasan penulis mengadakan penelitian ini dengan alasan karena saat ini diketahui Kabupaten Aceh Utara ini mengalami kerusakan infrastruktur yang cukup parah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur irigasi, banyak kerusakan infrastruktur pasca banjir beberapa waktu lalu, banyaknya kerusakan irigasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan persawahan mengalami gagal panen, hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius bagi masyarakat di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, maka dari itu masyarakat menuntut agar pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan segera melakukan pemeliharaan infrastruktur irigasi di Kecamatan Lhoksukon, karena apabila kerusakan irigasi ini terus dibiarkan, kemungkinan masyarakat di Kecamatan Lhoksukon, khususnya petani akan sering mengalami gagal panen dan berdampak pada menurunnya perekonomian masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Narbuko dan Achmadi dalam (Creswell & Creswell, 2018; Moleong, 2021) memberikan konsep penelitian deskriptif yang berusaha menjelaskan penelitian terkini yang memecahkan masalah berdasarkan data, sehingga juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya, bisa juga bersifat komparatif dan relasional.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Infrastruktur di Aceh Utara

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan. Partisipasi pada hakekatnya juga melibatkan keterlibatan mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai masyarakat, serta fisik seseorang dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses berjalan, serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas keterlibatannya. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, maka diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam membangun infrastruktur merupakan kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, perlunya diberikan bimbingan dalam upaya mengatasi munculnya rasa kesadaran untuk terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Dengan adanya keterlibatan itu maka suatu pembangunan akan bisa berjalan secara maksimal dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur desa sehingga diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintahan mengenali apa yang mereka butuhkan.

Partisipasi masyarakat yang muncul merupakan dukungan dari mereka yang mendorong bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu tanpa adanya partisipasi maka suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan ataupun pemeliharaan pembangunan desa dengan baik. Dalam hal ini untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara melihat dari indikator menurut Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Joyce dan Joorie (2021), yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi.

Hambatan Partisipasi Dalam Pemeliharaan Infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara

Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi ini dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa bantuan tenaga. Hal tersebut sifatnya gotong-royong yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran diri sendiri dalam pemeliharaan infrastruktur. Tanpa adanya bantuan gotong royong dari masyarakat desa, maka pemeliharaan infrastruktur tidak akan optimal, atau tidak

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya partisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara agar infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah akan lebih bertahan lama jika dipelihara dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan M. Jafar, ST selaku PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara menyatakan, "Kami sudah membangun infrastruktur di Aceh Utara, namun masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur." (Wawancara, 27 November 2023). Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara telah membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Lhoksukon mulai dari pembangunan jalan hingga pembangunan tanggul untuk mengatasi banjir yang terjadi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.

Pembangunan tanggul merupakan upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara untuk meminimalisir terjadinya banjir yang sering terjadi pada saat curah hujan yang tinggi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Perlunya partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan serta merawat fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara. Dalam hal ini peneliti melihat masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam memelihara infrastruktur khususnya tanggul yang ada di sepanjang sungai. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Yusuf, S.H., M.H selaku Pengamat Kebijakan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, menyatakan, "Saya melihat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur masih kurang kesadaran mereka. Penyebab banjir itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai" (Wawancara, 01 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf S.H., M.H selaku Pengamat Kebijakan Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur masih belum memiliki kesadaran untuk terus membantu pemerintah dalam menjaga infrastruktur yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara. Hal ini dilihat dari penyebab terjadinya banjir tersebut disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu upaya dalam mengatasi banjir adalah menjaga lingkungan tetap bersih agar dapat berfungsi dengan baik. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara yaitu dengan membersihkan selokan dan aliran sungai agar aliran mengalir dengan baik serta fungsi selokan dan sungai dapat optimal. Membuat saluran tempat-tempat yang tidak membuat saluran tersumbat, dan sungai supaya tidak menghambat penyumbatan dan aliran air. Usaha tidak membangun rumah di tepi sungai agar terhindar dari risiko banjir dan menghambat aliran sungai yang menyebabkan banjir dan tidak menebang pohon secara liar dan besar-besaran, hutan yang gundul dapat menyebabkan penyumbatan air yang berkumpul dan tanah mudah terkikis air hujan sehingga menyebabkan banjir dan longsor.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal, ST selaku Pengelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara menyatakan, "Kami sangat berharap masyarakat juga ikut menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah agar meminimalisir terjadinya banjir" (Wawancara, 27 November 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Fadil Malulanal, S.Sos., M.Si selaku Camat Lhoksukon menyatakan, "Kami sudah memberikan arahan kepada masyarakat disetiap gampong untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah, pemerintah akan berupaya untuk meminimalisir terjadinya banjir namun tetap tanpa adanya partisipasi masyarakat maka usaha pemerintah sia-sia" (Wawancara, 28 November 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal, ST selaku Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara dan Bapak Fadil Malulanal, S.Sos., M.Si selaku Camat Lhoksukon dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang paling penting untuk mencegah terjadinya banjir. Tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam hal ini menghalangi dari pemerintah maka masalah banjir di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara tidak akan teratasi sampai kapanpun.

Partisipasi dalam Evaluasi Pemeliharaan Infrastruktur di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

Partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pemeliharaan infrastruktur yang sedang berjalan (Abdullah, 2002; Firdaus, 2013; Sumaryadi, 2005). Tujuan evaluasi ini adalah untuk dapat dijadikan bahan masukan, pembelajaran, dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ke depannya. Untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan tersebut, biasanya pemerintah melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas dan membicarakan tentang hasil pembangunan dan membahas tentang pemeliharaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fadwal Malulanal, S.Sos., M.Si selaku Camat Lhoksukon, beliau mengatakan: "Setelah selesai pembangunan maka kami melakukan rapat dengan masyarakat kampung, hal tersebut membicarakan tentang pendapat dan masukan kepala kampung agar kinerja kami lebih ditingkatkan kembali" (Wawancara, 28 November 2023). Kutipan wawancara dengan Bapak Fadwal Malulanal, S.Sos., M.Si selaku Camat Lhoksukon dapat disimpulkan bahwa pihak pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara setelah melakukan pembangunan infrastruktur, melakukan evaluasi yang dihadiri oleh masyarakat kampung. Hal tersebut berisi tentang masukan dan kritik tentang pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jalilani ZK selaku Tokoh Masyarakat Kota Makmur, beliau mengatakan: "Setiap selesai pembangunan kami selalu melakukan rapat evaluasi, hal tersebut berisikan tentang menyampaikan penilaian tentang pembangunan yang dikelola oleh pemerintah. Serta membahas tentang pemeliharaan yang akan dilakukan oleh masyarakat kampung" (Wawancara, 30 November 2023). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jalilani ZK selaku Tokoh Masyarakat Kota Makmur dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara melakukan rapat dengan masyarakat untuk membahas tentang menyampaikan penilaian pembangunan

yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara juga membahas tentang pemeliharaan yang harus dilakukan oleh masyarakat kampung agar pembangunan tersebut terawat dan tetap terjaga.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara dalam membahas tentang evaluasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih sedikit dihadiri oleh masyarakat kampung. Padahal rapat evaluasi ini sangat penting untuk menunjang kinerja pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara untuk lebih baik lagi dalam proses pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riswan selaku Masyarakat Kampung Malenggeng Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara mengatakan: "Kami sudah menyampaikan aspirasi kami kepada pihak Dinas PUPR dan pihak camat bahwa dalam pembangunan jalan tidak efektif tapi tidak ada tanggapan dari pihak PUPR dan pihak camat" (Wawancara, 29 November 2023).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riswan selaku Masyarakat Kampung Malenggeng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa masyarakat kampung sudah memberikan kritik kepada pihak pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara dalam pembangunan infrastruktur jalan, akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara tidak memberikan tanggapan terhadap kritik yang sudah diberikan oleh masyarakat kampung. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Yusuf, SH., M.H selaku Pengamat Kebijakan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan: "Saya sudah mendengar banyaknya masyarakat yang sudah memberikan kritik kepada pemerintah tentang nominal pajak yang tinggi tapi kualitas pembangunan yang dinilai jelek" (Wawancara, 01 Desember 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Yusuf, SH., M.H selaku Pengamat Kebijakan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan bahwa masyarakat khususnya Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sudah memberikan aspirasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara, khususnya kepada pemerintah terkait tentang kualitas pembangunan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara masih dianggap buruk. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat kualitas pembangunan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara masih dianggap buruk. Hal tersebut dikarenakan pembangunan jalan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara sudah mengalami kerusakan. Padahal harga pajak yang dikenakan cukup tinggi. Seharusnya dengan harga pajak yang tinggi maka kualitas pembangunan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara harus lebih baik.

Dalam hal ini Partisipasi dalam Evaluasi Pemeliharaan Infrastruktur di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Hasil observasi yang peneliti lakukan, masyarakat sudah memberikan kritik kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara untuk lebih ditingkatkan kembali kualitas dalam pembangunan infrastruktur, akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara tidak memperbaiki kualitas pembangunan infrastruktur yang dikerjakannya. Banyaknya pembangunan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Utara mengalami kerusakan, padahal pajak yang diberikan cukup tinggi. Seharusnya dengan pajak yang tinggi maka kualitas pembangunan tersebut harus lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Partisipasi dalam pengambilan keputusan di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara masih tergolong rendah. Dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan pemeliharaan infrastruktur desa hanya beberapa orang warga perwakilan masyarakat saja. Partisipasi dalam pelaksanaan di desa Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara juga masih rendah, terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena proses pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur desa hanya beberapa orang yang dipengaruhi oleh faktor sibuk dengan kepentingan masing-masing. Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang didalamnya kesadaran menjalankan, merawat dan memelihara setiap hasil dari pembangunan desa yang sudah dilaksanakan juga masih rendah membuat hasil dari pembangunan infrastruktur desa mengalami kerusakan atau tidak terawat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara sering mengkritik pemerintahan, karena penilaian masyarakat selalu berjalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang memberikan perhatian yang membuat turunnya semangat masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur. 2). Faktor penyebab kurang partisipasinya masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Lhoksukon yaitu dari faktor ekonomi yang membuat masyarakat enggan ikut berpartisipasi. Faktor lingkungan yang kurang memiliki rasa kepedulian dalam pemeliharaan infrastruktur dan faktor pendidikan, kurangnya pemahaman masyarakat yang menganggap pemeliharaan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah bukan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, I. (2002). Tantangan Pembangunan Ekonomi dan Transformasi Sosial: Suatu Pendekatan Budaya. *Jurnal Humaniora*. Vol XIV No. 3/2002. Yogyakarta.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Firdaus, M. (2013). Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. *Orasi Ilmiah*.
- Hartati, I. (2020). Strategi pembangunan sdm kementerian keuangan republik Indonesia dalam menghadapi tantangan era disrupsi 4.0. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(1), 109–129.
- M, B. (2013). *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. , Total Media, Yogyakarta.

- Marlon Sihombing. (2007). *Desentralisasi dan Pembangunan Masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Medan*. Disertasi Sekolah Pascasarjana. Universitas Sumatera Utara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nizar, M., & Alqarni, W. (2021). *Book Series Demokrasi dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal* (Vol. 1). Syiah Kuala University Press.
- Sambodo, H., Pudjianto, H., Windhani, K., & Hardoyono, F. (2020). OTONOMI PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH: BAGAIMANAKAH DAMPAK TERHADAP KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH DI JAWA TENGAH? *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7403>
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Citra Utama (ed.)).
- Wu, X. (2021). On the hard Lefschetz theorem for pseudoeffective line bundles. *International Journal of Mathematics*, 32(06), 2150035.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–41.